Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No 3 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

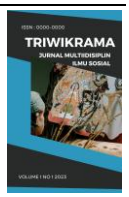

ANALISIS EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN SUBSIDI BBM: TARIK-MENARIK KEPENTINGAN ELITE DAN RAKYAT

Windi Nurmala Sari Frangga Kastela, Hendi Irawan
Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial
Universitas Indraprasta PGRI, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juli 2026
Revised Juli 2026
Accepted Juli 2026
Available online Juli 2026

Email:
windifranggakastela@gmail.com,
hendiirawankesos@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author.

Abstrak

Kebijakan dukungan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) selalu menjadi pusat diskusi dalam bidang ekonomi dan politik di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Di satu sisi, dukungan ini memberi beban besar pada anggaran negara; di sisi lain, merestrukturisasi atau menghapusnya dapat menyebabkan resiko tinggi terhadap ketidakstabilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika ekonomi dan politik yang mendasari penyusunan serta pelaksanaan kebijakan dukungan BBM, dengan fokus pada perbedaan kepentingan antara kelompok elit (politik dan ekonomi) dan masyarakat umum (rakyat). Dengan menggunakan metode kualitatif melalui kajian literatur dan analisis ekonomi politik kelembagaan, studi ini menjelaskan bagaimana dukungan BBM berfungsi lebih dari sekadar alat perlindungan sosial.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dukungan BBM telah berubah menjadi alat politik. Bagi elit politik, dukungan ini sering dimanfaatkan sebagai alat populis untuk mendapatkan dukungan pemilih dan mempertahankan keadaan yang ada, sementara pemain ekonomi (oligarki) memanfaatkan situasi ini dengan mencari keuntungan dari celah yang ada. Sebaliknya, di kalangan masyarakat, rakyat melihat dukungan ini sebagai hak dasar untuk menjaga daya beli dan kelangsungan hidup mereka, meskipun secara nyata distribusi dukungan sering kali tidak adil dan tidak sesuai sasaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakmampuan untuk mereformasi dukungan BBM berasal dari ketidaksetaraan kekuasaan politik. Peralihan menuju kebijakan energi yang lebih adil memerlukan pergeseran dari dukungan barang menjadi dukungan langsung yang tepat sasaran, yang memerlukan keinginan politik yang kuat untuk melepaskan kebijakan publik dari pengaruh kepentingan pragmatis elit.

Kata Kunci: Ekonomi Politik, Subsidi BBM, Kepentingan Elite, Kesejahteraan Rakyat, Kebijakan Publik, Populisme.

PENDAHULUAN

Bahan Bakar Minyak (BBM) bukan hanya barang energi yang menggerakkan mesin di pabrik dan kendaraan di jalan; ia menjadi elemen penting dalam ekonomi yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kenaikan harga BBM, sekecil apapun, selalu membawa dampak luas yang cepat—mulai dari peningkatan biaya pengiriman, tingginya harga bahan makanan di pasar, hingga berkurangnya kemampuan beli masyarakat yang kurang mampu. Karena pentingnya peran ini, keputusan mengenai harga dan subsidi BBM bukan hanya masalah angka ekonomi, tetapi selalu berkaitan erat dengan politik di negara ini.

Dalam konteks ekonomi makro, kebijakan subsidi BBM berfungsi seperti pedang yang memiliki dua sisi yang memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam kondisi ideal, subsidi seharusnya menjadi pelindung sosial atau penyangga untuk membantu rakyat menghadapi fluktuasi harga minyak dunia. Namun dalam kenyataannya, saat harga minyak internasional naik, biaya subsidi bisa melonjak hingga ratusan triliun rupiah. Besarnya jumlah ini tentunya membebani anggaran negara, menguras dana yang sebenarnya bisa digunakan untuk sektor penting dan berjangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Situasi dilematis ini menjadikan masalah subsidi BBM sebagai medan pertempuran bagi pengaruh dan kebijakan.

Di arena ini, dinamika ekonomi politik terlihat jelas melalui pertarungan kepentingan yang sangat kontras antara dua pihak utama: kelompok elit dan masyarakat umum, Bagi masyarakat di tingkat dasar, bahan bakar minyak yang mendapat subsidi dianggap sebagai gambaran nyata dari keberadaan negara. Sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, masyarakat melihat akses untuk mendapat energi dengan harga terjangkau sebagai hak dasar yang wajib dilindungi oleh pemerintah agar kehidupan dapat terus berjalan. Penolakan terhadap pengurangan atau penghapusan subsidi sering kali muncul dalam bentuk demonstrasi besar-besaran, pemogokan pekerja, hingga rasa ketidakpuasan sosial yang bisa mengguncang stabilitas negara.

Sebaliknya, di kalangan elit politik dan pemerintahan, pembicaraan mengenai subsidi BBM sering kali berubah menjadi alat untuk kepentingan politik. Menjaga harga bahan bakar yang rendah sering digunakan sebagai strategi yang menarik perhatian publik, terutama menjelang pemilihan umum. Kebijakan ini dimanfaatkan untuk menarik dukungan masyarakat, menjaga suara pemilih, dan mempertahankan kekuasaan, meskipun hal tersebut dapat merusak logika keuangan. Terdapat kekhawatiran yang mendalam di antara para pemimpin bahwa menaikkan harga BBM dianggap sebagai "bunuh diri politik. "

METODE

Penelitian ini didorong oleh keinginan untuk memahami struktur kekuasaan yang ada di balik suatu kebijakan publik. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pemilihan paradigma kualitatif didasarkan pada pemikiran bahwa data tentang defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebabkan oleh subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) hanya menunjukkan tanda-tanda di luar. Masalahnya yang sebenarnya terletak pada interaksi sosial, kompromi politik, dan hubungan kekuasaan yang tidak terlihat, yang tidak bisa hanya diukur atau dihitung dengan rumus matematis atau model ekonometrika.

Karakter deskriptif analitis dalam penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah cerita yang lengkap, teratur, dan berdasarkan fakta mengenai kenyataan kebijakan energi di Indonesia. Peneliti tidak berencana untuk menguji satu hipotesis saja, melainkan berusaha untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan menjelaskan secara rinci bagaimana interaksi antara rasionalitas ekonomi dan pragmatisme politik berlangsung. Dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi politik, peneliti akan menjelaskan dengan jelas bagaimana suatu komoditas ekonomi (BBM) berubah menjadi alat politik yang digunakan oleh para pemegang kuasa untuk menjaga dominasi, dan di saat yang sama, bagaimana masyarakat berjuang untuk mempertahankan hak-hak kesejahteraannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil studi menunjukkan bahwa pembagian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia telah melampaui tujuan asli sebagai alat untuk menstabilkan ekonomi makro, dan telah berubah menjadi alat politik yang terorganisir. Dari segi anggaran, negara menghadapi beban yang sangat besar; pada saat harga minyak mentah global melonjak, tagihan untuk subsidi dan kompensasi energi sering kali membengkak hingga mengambil lebih dari 15-20% dari total

anggaran negara (Bank Dunia, 2022). Namun, alih-alih menghadapi tekanan anggaran ini dengan logika ekonomi yang murni—seperti menyesuaikan harga dalam negeri dengan harga yang seharusnya—pemerintah biasanya memilih untuk menanggung kerugian itu. Keputusan untuk tidak menaikkan harga ini bukanlah hasil dari perhitungan untung-rugi oleh pengelola keuangan negara, melainkan mencerminkan negosiasi politik yang tingkat tingginya. Subsidi BBM berfungsi sebagai pengaman sistematis untuk meredakan ketegangan sosial sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan yang ada, membuktikan bahwa kebijakan energi nasional sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar ekonomi murni (Basri, 2019).

Dari sudut pandang elit politik, pembahasan mengenai subsidi BBM selalu dimanfaatkan sebagai alat populisme dalam pemilu. Analisis tentang sejarah kebijakan BBM menunjukkan adanya pola berulang yang sangat jelas, di mana keputusan untuk menahan atau menurunkan harga BBM bersubsidi terkait erat dengan jadwal politik, terutama menjelang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang serentak. Bagi para pejabat pemerintah dan anggota dewan, mempromosikan "BBM murah" adalah cara paling cepat dan efektif untuk mendapatkan dukungan publik, membangun citra peduli terhadap rakyat kecil, dan mempertahankan keadaan yang ada (Mietzner, 2020).

Dari sudut pandang elite politik, pembicaraan tentang subsidi BBM selalu digunakan sebagai alat untuk menarik suara dalam pemilu. Melihat sejarah kebijakan BBM, terlihat jelas bahwa ada pola yang berulang, di mana keputusan untuk menahan atau menurunkan harga BBM bersubsidi berkaitan erat dengan waktu pemilihan, terutama menjelang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Bagi para pemimpin pemerintahan dan anggota legislasi, mengedepankan "BBM murah" adalah cara yang cepat dan efektif untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat kecil, dan menjaga keadaan tetap sama (Mietzner, 2020). Para elite politik sangat memahami bahwa penyesuaian harga BBM bisa merusak dukungan suara mereka. Oleh karena itu, pertimbangan fiskal sering kali diabaikan demi menjaga suara, sehingga APBN menjadi alat politik yang harus dibayar mahal oleh negara selama bertahun-tahun.

Sementara itu, dalam kalangan elite ekonomi, pembuatan kebijakan subsidi yang berfokus pada barang telah menciptakan kelemahan dalam sistem yang dimanfaatkan secara teratur oleh para pengusaha besar melalui cara mencari keuntungan (rent-seeking). Perbedaan harga yang sangat signifikan antara BBM yang disubsidi dan BBM non-subsidi untuk industri menciptakan motivasi ekonomi yang besar untuk terjadinya penyelewengan (Robison & Hadiz, 2004). Temuan dari penelitian dan laporan hukum yang ditinjau dalam studi ini dengan jelas menunjukkan bahwa kebocoran subsidi tidak sering terjadi pada tingkat pengecer, tetapi melibatkan jaringan besar yang mengalirkan BBM bersubsidi ke sektor-sektor yang tidak berhak, seperti pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan industri besar.

Di sisi lain, dari perspektif masyarakat di tingkat bawah, perlindungan terhadap bantuan biaya bahan bakar minyak berasal dari keinginan untuk bertahan hidup di tengah masalah ekonomi yang sulit. Bagi mereka, bahan bakar minyak bukanlah barang mewah, tetapi merupakan faktor utama yang mendukung kehidupan ekonomi informal yang menjadi sumber pendapatan sebagian besar pekerja di Indonesia. Setiap kali harga bahan bakar minyak bersubsidi dinaikkan, dampak yang terjadi—seperti lonjakan inflasi pada harga yang diatur, yang berpengaruh pada peningkatan harga makanan dan biaya transportasi—langsung berdampak negatif pada kemampuan ekonomi masyarakat kelas rendah. Ketidakmampuan sistem jaminan sosial yang sering kali lambat dan kurang efektif ketika harga naik membuat masyarakat melihat subsidi

bahan bakar minyak sebagai satu-satunya bentuk nyata dari janji konstitusi mengenai negara kesejahteraan. Oleh karena itu, perjuangan masyarakat terhadap penghapusan subsidi merupakan tindakan rasional dari kelas bawah untuk menghindari terjerumus ke dalam kemiskinan.

Namun, analisis data yang ada mengungkapkan sebuah kontradiksi yang mengherankan: pernyataan bahwa subsidi BBM merupakan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin ternyata hanya sekadar ilusi yang menggugah emosi. Penelitian mengenai pembagian manfaat dari subsidi menunjukkan ketidakadilan yang sangat besar, di mana lebih dari 70% kuota BBM bersubsidi (terutama jenis Pertalite dan Solar) justru digunakan oleh kelompok masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki kendaraan pribadi, sementara 10% dari kelompok termiskin hampir tidak merasakan manfaatnya secara langsung (TNP2K, 2020). Realitas ini semakin menunjukkan bahwa narasi "untuk rakyat" yang sering disampaikan di arena politik sebenarnya hanyalah sebuah dalih. Para elit memanfaatkan alasan tentang kemiskinan untuk mempertahankan sebuah kebijakan yang pada kenyataannya lebih mendukung kenyamanan mobilitas kelompok kelas menengah dan menciptakan peluang keuntungan bagi kalangan atas, hal ini membuktikan adanya kejanggalan moral dalam struktur kebijakan publik kita.

Dinamika antara kebijakan keuangan dan tuntutan kesejahteraan ini mencapai titik tertinggi ketika pemerintah harus menaikkan harga bahan bakar minyak. Aksi demonstrasi besar-besaran yang dipimpin oleh kelompok mahasiswa, organisasi pekerja, dan lembaga masyarakat menjadi sarana perlawanan di luar parlemen ketika rakyat merasa tidak lagi diwakili oleh para pemimpin di dalamnya. Menarik untuk dicatat, analisis dari berbagai protes menunjukkan bahwa penolakan masyarakat sering kali tidak hanya karena kurangnya pemahaman tentang defisit anggaran, tetapi lebih disebabkan oleh kurangnya kepercayaan terhadap integritas para pemimpin. Masyarakat enggan menerima beban penghematan keuangan (kenaikan harga BBM) di saat yang bersamaan mereka dihadapkan pada kenyataan korupsi dalam lembaga, pembangunan proyek mewah yang menguntungkan kelompok elite, dan gaya hidup para birokrat yang berlebihan. Konflik ini mengubah masalah teknis mengenai energi menjadi sebuah krisis legitimasi yang berkaitan dengan masyarakat.

Kegagalan yang terus terjadi dalam mengubah kebijakan subsidi bahan bakar dari waktu ke waktu menunjukkan adanya perangkap institusi yang mengikat para pengambil keputusan. Usaha untuk melakukan reformasi yang mendalam, seperti beralih ke sistem subsidi tertutup atau program Bantuan Langsung Tunai untuk energi, selalu gagal sebelum benar-benar mulai karena adanya tekanan yang kuat dari berbagai pihak yang berkepentingan. Struktur birokrasi yang tidak teratur, tidak adanya data kemiskinan yang lengkap dan terkini, serta ketakutan para politisi terhadap hukuman politik dari masyarakat menengah yang sudah terbiasa mendapatkan subsidi, menciptakan lingkungan yang tidak mendukung perubahan (Winters, 2011). Sebagai hasilnya, pemerintah biasanya hanya menerapkan solusi-sementara yang tidak efektif, seperti membatasi jumlah CC kendaraan, yang tidak menyelesaikan masalah yang lebih besar, tetapi hanya menunda masalah keuangan sampai pemerintah berikutnya.

PEMBAHASAN

Memulai diskusi, hasil penelitian ini menguatkan argumen bahwa kebijakan subsidi bahan bakar minyak di Indonesia kini tidak berjalan semata-mata berdasarkan logika ekonomi makro, tetapi telah dipengaruhi secara mendalam oleh kepentingan politik para elit. Seperti yang diungkapkan oleh Basri (2019), dalam konteks ekonomi politik negara yang sedang berkembang,

anggaran sering dikendalikan oleh kebutuhan untuk menjaga dukungan pemilih. Kebijakan untuk menahan atau menurunkan harga bahan bakar minyak ketika harga minyak dunia meningkat adalah contoh nyata dari kebijakan populis. Bagi para pemimpin pemerintah dan anggota parlemen, subsidi adalah cara yang paling murah, luas, dan cepat untuk mendapatkan dukungan serta legitimasi kekuasaan, terutama menjelang pemilihan umum (Mietzner, 2020). Akibatnya, penggunaan anggaran yang seharusnya dipakai untuk investasi publik yang produktif dan berkelanjutan—seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan—harus dikorbankan untuk mengurangi ketegangan sosial dan menjaga kondisi politik yang ada. Situasi ini menunjukkan bahwa logika ekonomi seringkali harus mengalah kepada kepentingan politik, di mana kelangsungan karir politik elit lebih diutamakan dibandingkan keberlanjutan fiskal negara (World Bank, 2022).

Selanjutnya, pengaruh kebijakan ini tidak hanya dikendalikan oleh politisi yang terlibat dalam pemilihan, tetapi juga dipengaruhi oleh campur tangan para elit ekonomi atau oligarki melalui cara-cara mencari keuntungan (rent-seeking). Sistem subsidi yang masih terfokus pada barang - bukan pada orang yang seharusnya menerima - menyebabkan terjadinya perbedaan harga yang besar antara bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan BBM untuk industri. Robison dan Hadiz (2004) mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak tepat seperti ini selalu memberikan peluang bagi kelompok bisnis untuk memanfaatkan celah dalam regulasi. Tindakan penyelundupan, penimbunan, dan pengalihan BBM bersubsidi untuk sektor industri besar - seperti tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit - menjadi bukti nyata bahwa para elit ekonomi memperoleh keuntungan ganda. Mereka tidak hanya menikmati pengurangan biaya operasional yang ditanggung oleh pajak masyarakat, tetapi juga memperkuat dominasi bisnis mereka melalui hubungan patronase dengan calo hukum dan birokrasi. Oleh karena itu, diskusi tentang reformasi untuk subsidi yang lebih tepat sasaran sering kali terhalang oleh campur tangan yang tersembunyi dan kekuatan veto dari kelompok kepentingan ini (Winters, 2011)

Di sisi lain, pertentangan yang paling jelas dalam pembahasan ini adalah hilangnya ilusi "dukungan untuk orang miskin" yang selalu digunakan sebagai alat berbicara di ruang publik. Penolakan terhadap alasan di balik harga BBM selalu diwarnai oleh gelombang protes besar yang dipimpin oleh gabungan mahasiswa dan serikat pekerja dengan alasan membela orang kecil. Namun, data distribusi yang nyata menunjukkan bahwa sistem subsidi ini sebenarnya sangat tidak adil. Dalam evaluasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, lebih dari dua pertiga total subsidi BBM justru dinikmati oleh kelas menengah ke atas yang memiliki kendaraan pribadi, sedangkan kelompok masyarakat paling miskin hampir tidak mendapatkan keuntungan langsung. Meskipun demikian, ketidakpuasan masyarakat bawah tetap bisa dipahami jika dilihat dari sudut pandang kerentanan yang ada. Kenaikan harga BBM selalu menyebabkan inflasi harga makanan dan biaya transportasi yang sangat mempengaruhi daya beli masyarakat kelas bawah. Ini menunjukkan bahwa orang miskin sebenarnya bukanlah penerima utama subsidi, tetapi justru menjadi pihak paling rentan yang terkena dampak lambatnya pemerintah dalam menyiapkan jaring pengaman sosial yang tepat..

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Setelah melakukan analisis dalam bidang ekonomi politik yang telah dijelaskan, penelitian ini menemukan bahwa struktur kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia sudah sangat jauh dari prinsip ekonomi makro dan nilai keadilan sosial. Kebijakan ini kini telah

berubah secara tetap menjadi alat politik yang dikendalikan oleh keseimbangan tidak merata antara kepentingan pragmatis golongan elit dan kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat bawah.

Pertama, dari sisi elit, kebijakan subsidi BBM terpengaruh oleh hubungan yang saling menguntungkan antara kepentingan pemilihan umum dan pengumpulan kapital. Bagi para elit politik, penetapan harga BBM yang tetap menjadi alat populisme yang paling ampuh untuk menjaga dukungan pemilih dan legitimasi pemerintahan, terutama menjelang pemilihan umum. Di sisi lain, perancangan kebijakan subsidi yang berbasis barang dengan sengaja dibiarkan memiliki banyak celah, menciptakan lingkungan yang mendukung praktik mencari keuntungan yang tidak semestinya (rent-seeking). Golongan elit ekonomi dan oligarki bisnis dengan besar-besaran memanfaatkan celah ini dengan mengalihkan subsidi yang seharusnya untuk masyarakat miskin ke sektor industri besar, sehingga mereka meraih keuntungan ganda di atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kedua, dari perspektif masyarakat (rakyat), penolakan terhadap perubahan harga BBM sepenuhnya berasal dari insting untuk bertahan hidup. Meskipun sudah terbukti secara empiris bahwa pembagian subsidi BBM sangat tidak adil—karena lebih dari 70% kuotanya dinikmati oleh kelompok menengah ke atas—masyarakat miskin menjadi pihak yang paling tertekan daya belinya ketika harga BBM dinaikkan, akibat dari dampak inflasi pada pangan dan transportasi.

Penolakan sosial terus memperparah karena munculnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin. Rakyat tidak ingin terbebani lagi dengan kenaikan harga energi karena mereka terus-menerus menghadapi sistem birokrasi yang korup dan tidak efisien.

Akhirnya, tarik-menarik kepentingan ini menyebabkan terjadinya kebuntuan dalam struktur lembaga. Negara terus mengambil kebijakan yang hanya meredam gejolak secara reaktif, bukan melakukan perubahan mendasar, hanya menunda masalah keuangan yang bisa meledak menjadi krisis ke periode pemerintahan berikutnya. Subsidi bahan bakar minyak tidak lagi bertindak sebagai perlindungan sosial, melainkan menjadi tanda kegagalan kemauan politik negara menghadapi tekanan politik jangka pendek dan kartel ekonomi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, kesulitan dalam kebijakan subsidi bahan bakar minyak tidak bisa diatasi hanya dengan pendekatan teknis atau sekadar mengubah cara menghitung harga secara ekonomis. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan langkah-langkah strategis dan struktural berikut ini:

1. Transformasi drastis dari subsidi komoditas ke subsidi langsung kepada orang.

Pemerintah perlu membuat keputusan politik yang berani untuk mengakhiri sepenuhnya masa subsidi yang didasarkan pada barang tertentu, karena sistem ini terbukti memudahkan pengambilan keuntungan tidak sah dan tidak tepat sasaran. Kebijakan perlu diubah menjadi subsidi langsung yang diberikan kepada orang-orang, seperti Bantuan Langsung Tunai atau mengintegrasikan data biometrik pada KTP untuk pembelian energi. Langkah ini membutuhkan perbaikan mendasar pada Basis Data Terpadu (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS) agar distribusi jaring pengaman sosial lebih tepat sasaran, dapat diakses secara langsung, dan mengurangi kemungkinan kebocoran data. Cukup dengan menghentikan subsidi bahan bakar, negara bisa mengurangi kemampuan kartel penyelundup BBM industri beroperasi.

2. Pembangunan Kembali Kepercayaan Masyarakat Melalui Transparansi Anggaran (Kontrak Sosial Baru)

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan uang negara sering kali menjadi penyebab mereka tidak menerima kenaikan harga BBM. Pemerintah dan para pejabat politik harus memulihkan kepercayaan rakyat dengan cara yang jelas dan terbuka, melalui sistem pengalokasian dana yang transparan. Setiap uang yang bisa diselamatkan dari pengurangan subsidi BBM harus digunakan dengan jelas, terukur, dan terbuka untuk program-program yang benar-benar membantu kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, biaya transportasi umum yang murah, dan asuransi pertanian. Masyarakat akan lebih bijak menerima penghapusan subsidi jika mereka melihat uang tersebut benar-benar digunakan untuk fasilitas umum yang merata, bukan disalahgunakan atau dialihkan untuk proyek-proyek yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.

3. Rekonstruksi Narasi Gerakan Masyarakat Sipil

Bagi masyarakat sipil, mahasiswa, dan serikat pekerja, diperlukan perubahan cara berpikir dalam melakukan advokasi terhadap kebijakan. Gerakan sosial harus berhenti terjebak dalam isu populis yang membela harga bahan bakar minyak yang murah, karena narasi itu justru pada kenyataannya membela kenyamanan kalangan menengah atas. Tuntutan harus diarahkan ke desakan untuk membangun sistem perlindungan sosial yang menyeluruh dan upah yang adil. Masyarakat sipil seharusnya lebih menekan pemerintah agar mengatasi mafia migas dan memperluas akses pada jaring pengaman sosial, bukan hanya menuntut agar harga bensin diturunkan secara buatan.

4. Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Untuk peneliti berikutnya yang tertarik mempelajari topik ini, disarankan untuk membatasi analisis pada kasus tertentu yang lebih spesifik, seperti mengungkap proses distribusi bahan bakar dan peran para aktor dalam penyalahgunaan bahan bakar subsidi di area pertambangan atau perkebunan tertentu. Selain itu, penelitian lebih lanjut bisa menganalisis dampak politik dan ekonomi dari kebijakan transisi energi, misalnya perpindahan dari bahan bakar minyak ke kendaraan listrik, untuk melihat apakah transisi ini benar-benar membuat akses energi lebih adil, atau hanya menggeser lokasi pengambilan keuntungan kepada komoditas baru saja.

DAFTAR PUSTAKA

Aspinall, E. (2015). Oligarchic populism: Prabowo Subianto's challenge to Indonesian democracy. Indonesia, 99, 1–28.

Badan Pusat Statistik. (2023). Laporan analisis dampak inflasi kebijakan energi nasional 2022-2023. Badan Pusat Statistik.

Basri, F. (2019). Lanskap ekonomi politik Indonesia: Menuju pembangunan yang inklusif. Penerbit Buku Kompas.

International Institute for Sustainable Development. (2023). Navigating the fuel subsidy reform: Lessons from developing nations. International Institute for Sustainable Development.

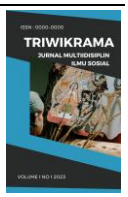

Mietzner, M. (2020). Populism and democratic decline in Indonesia. Journal of Democracy, 31(4), 161–175.

Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets. Routledge.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2020). Evaluasi efektivitas penyaluran subsidi energi berbasis komoditas. Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.

Winters, J. A. (2011). Oligarchy. Cambridge University Press.

World Bank. (2022). Indonesia economic prospects: Navigating the storm, focusing on fiscal sustainability. World Bank Group.

Basri, F. (2019). Lanskap ekonomi politik Indonesia: Menuju pembangunan yang inklusif. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Winters, J. A. (2011). Oligarchy. New York: Cambridge University Press.